

Kebijakan Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar

Azzahra Muthia Selena, Farida Hanum, Dea Mustika

Universitas Islam Riau

Email : azzahramuthiaselena@student.uir.ac.id, faridahanum@student.uir.ac.id

Abstrak

Kebijakan pendidikan inklusi masih dipandang belum maksimal dilihat dari pengelolaan maupun implementasinya. Tujuan penelitian ini yakni mengetahui kebijakan pendidikan inklusi di sekolah dasar Pendidikan inklusif merupakan tantangan tersendiri bagi pimpinan sekolah dan guru lembaga pendidikan. Pendidikan inklusi di Sd perlu mendapat perhatian lebih, karena anak sd masih memerlukan perhatian intensif dari guru dan keberadaan siswa berkebutuhan khusus tentu tidak mudah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, menganalisis adanya faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah dasar. Simpulkan bahwa Kebijakan pendidikan inklusi di sekolah dasar merupakan bentuk upaya pemerintah dalam membentuk generasi penerus bangsa agar dapat memahami dan menerima segala bentuk perbedaan serta menghindari sifat diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata kunci: *Implementasi kebijak, Pendidikan Inklusi*

Abstract

Inclusive education policies are still considered not optimal in terms of their management and implementation. The aim of this research is to find out inclusive education policies in elementary schools. Inclusive education is a challenge for school leaders and teachers of educational institutions. Inclusive education in elementary school needs to receive more attention, because elementary school children still require intensive attention from teachers and the presence of students with special needs certainly makes it difficult to achieve learning goals. This research uses descriptive qualitative methods, analyzing the supporting and inhibiting factors in the implementation of inclusive education in elementary schools. Conclude that the inclusive education policy in elementary schools is a form of the government's efforts to shape the nation's next generation so that they can understand and accept all forms of differences and avoid discrimination in social life.

Keywords: *Policy implementation, Inclusive Education*

Pendahuluan

Kebijakan pendidikan inklusif adalah satu kebijakan yang bertujuan agar pendidikan dapat menjangkau semua kalangan. Pendidikan inklusi merupakan pendekatan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan belajar semua anak, remaja dan orang dewasa yang difokuskan secara spesifik kepada mereka yang rawan dan rapuh terpinggirkan dan terabaikan. Pendidikan mempunyai arti bahwa sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa mempedulikan keadaan fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa atau kondisi lain, termasuk anak penyandang cacat, anak-anak berbakat (*gifted children*), pekerja anak dan anak jalanan, anak di daerah terpencil, anak dari kelompok etnik dan bahasa minoritas dan anak yang tidak beruntung dan terpinggirkan dari kelompok masyarakat. Pendidikan inklusi adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan pelayanan dan kesempatan kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus dan anak dengan potensi kecerdasan atau kemampuan khusus, untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran dalam lingkungan dengan anak dengan menggunakan kriteria yang seragam. Pasal 32(1) konstitusi (1945) menegaskan bahwa "setiap warga negara berhak atas pendidikan"; Pasal 32 (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak dan wajib memperoleh pendidikan dasar dan negara berkewajiban membiayainya". Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, pasal 5(1), yang menegaskan bahwa "setiap warga negara mempunyai hak yang sama atas pendidikan yang bermutu". (H, 2020)

Pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar siswa. Peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau potensi kecerdasan dan/atau kemampuan khusus memerlukan layanan pendidikan yang memenuhi kebutuhan dan hak asasi manusia. Selain itu, pendidikan khusus dapat diselenggarakan bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau potensi kecerdasan dan/atau kemampuan khusus. (Purbasari, Hendriani, & Yoenanto, 2022). Pendidikan inklusif terus dipahami sebagai upaya mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler dalam rangka memberikan hak semua anak untuk memperoleh pendidikan, memfasilitasi akses pendidikan dan menghapuskan diskriminasi. (Nasir, et, 2023)

Meskipun didukung oleh visi yang cukup jelas untuk menerima anak berkebutuhan khusus, beberapa di antaranya telah memiliki pedagogi khusus, catatan hambatan belajar bagi setiap anak berkebutuhan khusus, serta kebebasan guru kelas dan guru berkebutuhan khusus untuk melaksanakannya. mereka pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif di dalam kelas biasanya tidak didukung oleh koordinasi dengan para profesional, organisasi atau lembaga terkait. Keterlibatan orang tua sebagai salah satu kunci keberhasilan pendidikan inklusif belum berkembang dengan baik (Mayya, 2019).

Dinas Pendidikan telah lama mengimplementasikan pendidikan inklusi, salah satunya adalah program pendidikan inklusi yang dilaksanakan di sekolah dasar negeri. Kegagalan dan keberhasilan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah dipengaruhi oleh implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah tersebut. Oleh karena itu diperlukan pemimpin dan pelaksana yang mengetahui dan mau mengimplementasikan kebijakan program pendidikan inklusi. Jika kebijakan tersebut tidak dilaksanakan dengan benar, terdapat kesenjangan implementasi di lapangan, yang berarti terdapat perbedaan antara hukum tertulis dengan praktik di lapangan atau sekolah (Wijaya, Supena, & Yufiarti, 2023). Kesenjangan pelaksanaan tersebut dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah. Menutup kesenjangan yang sebenarnya membutuhkan pendekatan dan upaya yang fokus pada kualitas kebijakan yang sesuai dengan praktik industri sesuai kebutuhan masyarakat sasaran (Sulistyadi, 2020) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengamati dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan program pendidikan inklusi di sekolah dasar negeri. Penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan harapan antara program yang diusulkan dengan pelaksanaan di lapangan khususnya di sekolah dasar. Sehingga dapat dilakukan koreksi dan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini.

Metode Penelitian

Metode deskriptif kualitatif adalah metode yang menjelaskan atau menggambarkan fakta, data secara sistematis dan sesuai dengan latar alamiahnya. Mengenai pertanyaan penelitian, hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada hasil, metode kualitatif dianggap sangat cocok untuk memenuhi tujuan penelitian ini, yaitu. Untuk mengetahui apa saja faktor - faktor pencegah dan pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah dasar.

Hasil dan Pembahasan

Program pendidikan inklusi di sekolah merupakan kebersamaan peserta didik di kelas dalam lingkungan dan layanan pendidikan yang sama, kebersamaan siswa normal dan anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah diyakini akan membawa suatu pengaruh positif yang sangat konstruktif dan efektif untuk mengintegrasikan mereka dalam suatu kehidupan sekolah dan kemudian berlanjut di luar sekolah. Kehidupan di lingkungan masyarakat menuntut mereka dapat berbaur serta berinteraksi dengan masyarakat yang sangat beragam Untuk dapat hidup dalam lingkungan masyarakat dengan baik maka perlu menyiapkan mereka sejak belajar di sekolah menjadi suatu keharusan. Peserta didik normal maupun anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama, meskipun dengan hambatan dan perbedaan kemampuan yang

mereka miliki (Kadir, 2019). Siswa yang tidak terbiasa bergaul dalam keragaman majemuk di sekolah akan menjadi sulit bergaul dengan lingkungan masyarakat. Kebersamaan siswa di sekolah inklusi ditujukan pula untuk mereduksi kesenjangan agar mereka terbiasa hidup dalam keragaman, sehingga mereka saling mengenal, mengetahui, dan memahami tentang keberadaan setiap individu.

Anak berkebutuhan khusus dapat memperoleh pembelajaran dalam hubungannya dengan peserta didik normal, demikian sebaliknya, bahwa peserta didik normal dapat belajar bagaimana mengembangkan sikap untuk bisa menerima kehadiran anak berkebutuhan khusus. Interaksi antar siswa sebenarnya tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi perkenalan mereka di sekolah akan berlanjut pada interaksi mereka di luar sekolah dalam bentuk komunikasi, silaturahmi antar siswa, dan terkadang melibatkan orang tua serta keluarga, sehingga mereka dapat saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. Hal ini dapat menjadi jalan bagi peserta didik normal maupun anak berkebutuhan khusus bahwa sekolah inklusi dapat menjadi model terapi dalam mengurangi kesenjangan kehidupan antara anak normal dan anak berkebutuhan khusus. Model pendampingan yang dilakukan di sekolah inklusi pada jam belajar atau jam khusus konseling peserta didik dapat menjadi kesempatan upaya pengobatan atau terapis bagi siswa. Meskipun pada pelaksanaannya masih terdapat faktor penghambat seperti masih minimnya guru pendamping pada sekolah dengan program pendidikan inklusi (Widyawati, 2019).

Pendidikan inklusi merupakan solusi bagi peserta didik anak berkebutuhan khusus untuk tidak mengalami tekanan psikologis karena keadaan yang menimpa dirinya. Mengangkat harkat dan martabat anak berkebutuhan khusus, merasa diterima dan tidak terpinggirkan dengan keadaan yang menimpa dirinya akan dapat mendorong aktivitas siswa lebih aktif serta dapat mengembangkan kreativitasnya. Lembaga pendidikan yang dapat merangkul dan menerima keragaman seharusnya melakukan reorientasi kurikulum, infrastruktur, maupun sistem pembelajaran yang kompatibel dengan kebutuhan individu peserta didik yang beragam (Kadir, 2020). Konsep *education for all* (pendidikan untuk semua) mengisyaratkan perlunya sekolah serta lembaga pendidikan mempersiapkan pendidik yang memiliki kompetensi dan pemahaman serta mampu mendidik dan mengajar setiap individu sebagai akibat bahwa *human differences* dan *learning styles differences* dianggap sebagai sesuatu yang alamiah dan normal. Implementasi kebijakan sekolah inklusi di sekolah dasar perlu ditinjau secara menyeluruh agar diketahui apakah pendidikan inklusi yang telah diterapkan sudah berjalan dan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Implementasi kebijakan pendidikan inklusi merupakan aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan pengguna serta dapat diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini,

dapat ditegaskan bahwa dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan yang dirancang dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasi penerapannya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Pada akhirnya dapat dipastikan bahwa pada tahapan evaluasi kebijakan, akan menghasilkan penilaian bahwa antara formulasi dan implementasi kebijakan tidak seiring sejalan, bahwa implementasi dari kebijakan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri (Nurwan, 2022)

Upaya kepala sekolah dan guru dalam implementasi pendidikan inklusi. Lembaga sekolah dan dinas pendidikan terus berupaya melakukan perbaikan dan mencari solusi untuk menangani hambatan yang terjadi pada pelaksanaan program pendidikan inklusi. Upaya yang sudah dilakukan diantaranya:

1. Sosialisasi yang dilakukan bersama komite sekolah sebagai upaya memberikan pemahaman dan peningkatan kesadaran pada seluruh orang tua murid di sekolah dasar tersebut;
2. Pelatihan dan workshop mengenai penanganan anak berkebutuhan khusus terus dilakukan sebagai upaya peningkatan mutu layanan pada implementasi program pendidikan inklusi dan sebagai peningkatan kompetensi guru;
3. Pihak sekolah bekerjasama dengan dinas pendidikan mengadakan pelatihan pengembangan model kurikulum dalam upaya reorientasi kurikulum bagi sekolah inklusi;
4. Sekolah terus berupaya melengkapi sarana pendukung untuk meningkatkan pelayanan pendidikan pada sekolah inklusi, dengan bekerjasama dinas pendidikan melalui pemerolehan bantuan dari pemerintah pusat untuk pemenuhan fasilitas pada sekolah inklusi.

Kesimpulan

Kebijakan pendidikan inklusi di sekolah dasar merupakan bentuk upaya pemerintah dalam membentuk generasi penerus bangsa agar dapat memahami dan menerima segala bentuk perbedaan serta menghindari sifat diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam penyelenggaraannya peran kepala sekolah dominan menunjukkan keberhasilan pendidikan inklusi tersebut. Kepala sekolah sebagai leader dapat menentukan kebijakankebijakan yang strategis untuk menunjang keberhasilan program pendidikan inklusi. Dalam pengelolaan dan pelaksanaannya terdapat faktor pendukung serta penghambat yang mempengaruhi keberhasilan program tersebut. Kepala sekolah dapat melakukan kebijakan yang tepat untuk memberikan kesempatan dan mendorong guru dalam mengembangkan kompetensi, serta berkaitan dengan pengelolaan sarana prasarana yang masih perlu dilengkapi sesuai kebutuhan pada sekolah inklusi. Meskipun pada implementasi pendidikan inklusi di

sekolah dasar masih ditemukan beberapa kendala, akan tetapi kepala sekolah, guru, dinas pendidikan dan masyarakat terus berupaya melakukan kerjasama untuk melakukan peningkatan pengelolaan dan implementasi agar dapat memberikan solusi dan layanan yang tepat bagi siswa pada umumnya dan anak berkebutuhan khusus sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah dasar.

Bibliografi

- Danarhadi, Fatih Hendri. (2020). Implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SMP Ekakapti Karangmojo Gunung Kidul Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 6(5), 1–9.
- H, Rachmah. (2019). Nilai-Nilai dalam Pendidikan Karakter Bangsa yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. *E-Journal Widya Non-Eksakta*, 1(1), 7–14.
- Inklusif, Hakikat Pendidikan, Menengah, Sekolah, Biasa, Luar, Luar, Sekolah, & Tunanetra, Biasa. (2021). *Hakikat Pendidikan Inklusi*. 0–11.
- Lalak Muslimin, Luk Luk Yata, & Muqowim, Muqowim. (2021). Peran Kepala Sekolah Terhadap Kebijakan Pendidikan Inklusi Di Tingkat Sekolah Dasar. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran*, 7(3), 708. <https://doi.org/10.33394/Jk.V7i3.3468>
- Mayya, Mayya. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi Pada Sekolah Dasar. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 26(1), 108–117. <https://doi.org/10.17509/Jap.V26i1.19853>
- Nasir, Et, Al. (2023). *Implementasi Pendidikan Inklusi Sekolah Dasar*. 9, 356–363.
- Natalia, Kristiana, & Mundilarno, Mundilarno. (2019). Manajemen Pembelajaran Inklusi Dalam Mewujudkan Mutu Pendidikan. *Media Manajemen Pendidikan*, 2(1), 100. <https://doi.org/10.30738/mmp.v2i1.3556>
- Purbasari, Yulia Anjarwati, Hendriani, Wiwin Hendriani, & Yoenanto, Nono Hery. (2022). Perkembangan Implementasi Pendidikan Inklusi. *Jurnal Pendidikan (Teori Dan Praktik)*, 7(1), 50–58. <https://doi.org/10.26740/jp.v7n1.p50-58>
- Setyati, Ajeng. (2022). Bimbingan dan Konseling Anak Berkebutuhan Khusus. *Academia*.
- Sulistiyadi, Hery Kurnia. (2020). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Sidoarjo. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2(1), 1–10.
- Tryas W.N. (2019). Implementasi Pendidikan Inklusif. *Journal of Education on Social Science*, 3 no 2(2550–0147), 201–212.
- Wijaya, Sastra, Supena, Asep, & Yufiarti. (2023). Implementasi Program

Azzahra Muthia Selena, Farida Hanum, Dea Mustika

Pendidikan Inklusi Pada Sekolah Dasar di Kota Serang. *Jurnal
Educatio FKIP UNMA*, 9(1), 347–357.
<https://doi.org/10.31949/educatio.v9i1.4592>

Copyright holder:

Azzahra Muthia Selena (2024)

First publication right:

Catha : Journal of Creative and Innovative Research